

Koetaradja, 17 Juli 1952.-

1183

No. 162/Um/Rah.

Lampiran : ..

Perihal : Hierarchie pemerintahan.-

Mr. M.  
Muskus berkesonja.  
10/7

Dengan hormat,

Seringkali terdjadi didaerah ini, bahwa se-orang kepala daerah mengirinkan surat langsung kepada instansi atasan dengan menjampingkan kepala daerah jang sotingkat lebih atas dari padanja.

Didalam hal ini kami merasa perlu kiranja untuk minta perhatian Saudara lagi terhadap surat edaran Gubernur Sumatera Utara tanggal 30-1-1951... No.748/1/P.S.U.... mengenai hierarchie pemerintahan, bahwa urusan pemerintahan harus berdjendjang keatas dan kebawah. Ini sudah mendjadi suatu adat-istiadat pemerintahan jang tidak boleh dilanggar begitu sadja; barangsiapa jang melanggarnya melakukan suatu perbuatan indisciplinair jang dapat dihukum setjara administratif. Pada hakikatnja adat-istiadat ini tidaklah hanja bersandar kepada soal kesopanan dan peradaban sadja, tetapi adalah system pemerintahan jang telah tahan udji dan bersendi kepada pertimbangan2 organisatoris.

Tidaklah mungkin instansi2 atasan akan memahami benar seluk-beluk sesuatu masaalah jang dikemukakan, sebelum instansi2 jang berdjendjang dibawahnja melapurkan keadaannja, memberikan pandangan dan pertimbangannja masing2. Tiap2 keputusan dari putjuk pimpinan pemerintahan perlu didasarkan kepada laporan2 jang lengkap. Instansi jang bertanggung djawab tidak akan berani memberi keputusan begitu sadja, apabila ternjata bahwa adasalah satu instansi dibawahnja dilewati (dikesampingkan). Akibatnja ialah, bahwa urusannja dikembalikan kebawah lagi. Sudah tentu hal ini hanja membuang waktu sadja dan menghambat penjelesaiannya pekerjaan.

Kami mengetahui apa sebabnja seringkali sampai kedjadian hal jang kami sebut diatas, misalnja apabila ada:

- a. selisih paham antara kepala daerah dengan kepala daerah diatasnja mengenai sesuatu masaalah pekerjaan,
- b. perasaan kurang puas terhadap beleid kepala daerah diatasannja mengenai penjelesaian sesuatu pekerjaan,
- c. sebab2 lain.

Bagaimanapun

Kepada  
Semua Bupati/Wedana  
di bawah Atik

Handwritten signature and date: 10/7

Bagaimanapun djuga, tidak selajaknja kepala daerah jang bersangkutan dikesampingkan begitu sadja. Selain dari hanja akan menghambat djalannja pekerdjaan sadja seperti tadi telah saja djelaskan, sikap jang demikian itu akan memberikan kesan, bahwa dikalangan Pamong Pradja ada suasana hubungan jang kurang sehat diantara pegawai2nja. Djika ini diketahui oleh umum, maka dengan sendirinja gezag Pamong Pradja akan tersinggung oleh karenanja, jang tentu akan menimbulkan kesulitan2 baru dilain lapangan pekerdjaan kita.

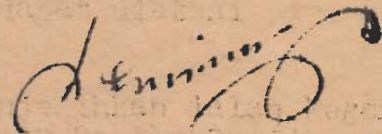
Apa salahnja apabila kita terlebih dahulu menjurati atau menemui kepala daerah jang bersangkutan untuk minta keterangan lebih landjut sampai dimana pengurusan sesuatu pekerdjaan, sebelum kita mengemukakan soalnja kepada instansi2 jang lebih atasan? Dalam suasana persaudaraan dan saling mengerti lebih banjak kesulitan2 atau ketegangan2 dapat diatasi dari pada kita saling djauh-mendjauhi.

Soal lain lagi jang menjedihkan ialah kegemaran dari beberapa golongan pegawai2 Pamong Pradja untuk membuat pegeledd, seperti baru2 ini dikirimkan pula oleh Kepala2 Mukim Labupaten Atjeh Besar langsung kepada Gubernur Sumatera Utara, Menteri Dalam Negeri, Ketua Parlemen dan lain-lain (dengan antjaman pula dalam waktu 30 hari akan tidak mau bertanggung djawab lagi apabila permintaannja tidak dipenuhi) dengan tidak diadakan perundingan dengan Tjamat, Wedana, Bupati dan kami sendiri terlebih dahulu. Sedangkan sebenarnja oleh instansi2 tersebut dan djuga oleh Gubernur Sumatera Utara sendiri hal kedudukan Kepala2 Mukim sudah lama diperdjuangkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan sekarang sudah dalam perundingan ditingkatan jang tertinggi.

Bahwasanja sampai kini belum ada keputusannja, mungkin oleh karena urusan ini tidak hanja mengenai Atjeh sadja, tetapi mengenai Indonesia seluruhnja jang harus ditindjai setjara integral. Pegawai jang nasional-bewust seharusnya dapat menghadapi kenjataan ini dengan hati jang sabar dan djiwa jang lapang "Satu untuk semua dan semua untuk satu" hendeknja mendjadi sembojan pula bagi kita pegawai2 Pamong Pradja.

Mudah-mudahan dengan surat edaran ini kedjadian2 jang kurang tepat tidaklah akan berulang kembali hendaknja.-

Koordinator Pemerintahan Untuk  
Atjeh,



R. Marjono Dancobroto

Tembusan dengan hormat dikirim  
kepada Sandara Gubernur  
Sumatera Utara di Medan,  
untuk dimaklumi.-

Koetaradja, 17 Juli 1952.-

<sup>1183</sup>  
No. 162/Um/Rah.

-----  
Lampiran : ..

Perihal : Hierarchie pemerintahan.-  
-----

Dengan hormat,

Seringkali terdjadi didaerah ini, bahwa se- orang kepala daerah mengirinkan surat langsung ke- pada instansi atasan dengan menjampingkan kepala daerah jang setingkat lebih atas dari padanja.

Didalam hal ini kami merasa perlu kiranja un- tuk minta perhatian Saudara lagi terhadap surat e- daran Gubernur Sumatera Utara tanggal .30-1-1951... No.746/1/P.S.U..... mengenai hierarchie pemerinta- han, bahwa urusan pemerintahan harus berdjendjang keatas dan kebawah. Ini sudah mendjadi suatu adat- istiadat pemerintahan jang tidak boleh dilanggar begitu sadja; barangsiapa jang melanggarnya melaku- kan suatu perbuatan indisciplinair jang dapat dihu- kum setjara administratif. Pada hakikatnja adat- istiadat ini tidaklah hanja bersandar kepada soal kesopanan dan peradaban sadja, tetapi adalah systeem pemerintahan jang telah tahan udji dan bersendi ke- pada pertimbangan2 organisatoris.

Tidaklah mungkin instansi2 atasan akan memaha- mi benar seluk-beluk sesuatu masaalah jang dikemuka- kan, sebelum instansi2 jang berdjendjang dibawahnja melapurkan keadaannya, memberikan pemandangan dan pertimbangannya masing2. Tiap2 keputusan dari putjuk pimpinan pemerintahan perlu didasarkan kepada laporan2 jang lengkap. Instan- si jang bertanggung djawab tidak akan berani membe- ri keputusan begitu sadja, apabila ternjata bahwa adasalah satu instansi dibawahnja dilewati (dike- sampingkan). Akibatnja ialah, bahwa urusannya di- kembalikan kebawah lagi. Sudah centu hal ini hanja membuang waktu sadja dan menghambat penjelesaiannya pekerdjaan.

Kami mengetahui apa sebabnja seringkali sam- pai kedjadian hal jang kami sebut diatas, misalnja apabila ada:

- a. selisih faham antara kepala daerah dengan kepa- la daerah diatasnja mengenai sesuatu masaalah pekerdjaan,
- b. perasaan kurang puas terhadap beleid kepala dae- rah diatasannya mengenai penjelesaian sesuatu pekerdjaan,
- c. sebab2 lain.

Bagaimanapun

Kepada  
Semua Bupati/Wedana  
seluruh Atjeh.-

Bagaimanapun djuga, tidak selajaknja kepala daerah jang bersangkutan dikesampingkan begitu sadja. Selain dari hanja akan menghambat djalannja pekerdjaan sadja seperti tadi telah saja djelaskan, sikap jang demikian itu akan memberikan kesan, bahwa dikalangan Pamong Pradja ada suasana hubungan jang kurang sehat diantara pegawai2nja. Djika ini diketahui oleh umum, maka dengan sendirinja gezag Pamong Pradja akan tersinggung oleh karenanja, jang tentu akan menimbulkan kesulitan2 baru dilain lapangan pekerdjaan kita.

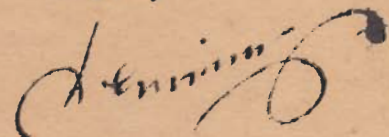
Apa salahnja apabila kita terlebih dahulu menjurati atau menemui kepala daerah jang bersangkutan untuk minta keterangan lebih landjut sampai dimana pengurusan sesuatu pekerdjaan, sebelum kita mengemukakan soalnya kepada instansi2 jang lebih atasan? Dalam suasana persaudaraan dan saling mengerti lebih banjak kesulitan2 atau ketegangan2 dapat diatasi dari pada kita saling djauh-mendjauhi.

Soal lain lagi jang menjedihkan ialah kegemaran dari beberapa golongan pegawai2 Pamong Pradja untuk membuat resolusi, seperti baru2 ini dikirimkan pula oleh Kepala2 Mukim Kabupaten Atjeh Besar langsung kepada Gubernur Sumatera Utara, Menteri Dalam Negeri, Ketua Parlemen dan lain-lain (dengan antjaman pula dalam waktu 30 hari akan tidak mau bertanggung djawab lagi apabila permintaannya tidak dipenuhi) dengan tidak diadakan perundingan dengan Tjamat, Wedana, Bupati dan kami sendiri terlebih dahulu. Sedangkan sebenarnya oleh instansi2 tersebut dan djuga oleh Gubernur Sumatera Utara sendiri hal kedudukan Kepala2 Mukim sudah lama diperdjuangkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan sekarang sudah dalam perundingan ditingkatan jang tertinggi.

Bahwasanja sampai kini belum ada keputusannya, mungkin oleh karena urusan ini tidak hanja mengenai Atjeh sadja, tetapi mengenai Indonesia seluruhnja jang harus ditindjau setjara integraal. Pegawai jang nasional-bewust seharusnya dapat menghadapi kenjataan ini dengan hati jang sabar dan djiwa jang lapang "Satu untuk semua dan semua untuk satu" hendaknya mendjadi sembojan pula bagi kita pegawai2 Pamong Pradja.

Mudah-mudahan dengan surat edaran ini kedjadian2 jang kurang tepat tidaklah akan berulang kembali hendaknja.-

Koordinator Pemerintahan Untuk  
Atjeh,



R. Marjono Danoebroto

Tembusan dengan hormat dikirim  
kepada Saudara Gubernur  
Sumatera Utara di Medan,  
untuk dimaklumi.-

-----

KOETARADJA, 10 SEPTEMBER 1951.-

No. 6300/5/Um.-

\*\*\*\*\*

Peri hal : Surat - menjurat.-

\*\*\*\*\*

Dengan hormat.

Atjap kali ada surat2 jang dialamatkan kepada pihak atasan (setingkat lebih atas dari jang semestinja), misalnja dari Wedana langsung kepada Koordinator dengan meliwati Bupati, atau dari Kepala Negeri langsung kepada Bupati dengan meliwati Wedana d.s.b. Hal ini sebenarnja tidak boleh oleh karena melanggar tata tertib pemerintahan jang harus berdjalan berdjendjang dari atas kebawah dan sebaliknya, dari bawah keatas.

Walaupun begitu, terkadang-kadang oleh karena soalnja mendesak, surat jang dikirimkan liwat (via) Kepala Daerah jang bersangkutan diteruskan sadja keatasannya dengan tjatatan "mengetahui" atau kalau perlu dengan diberi pendapat atau pertimbangannya. Tetapi ada diantara kepala2 daerah jang kami maksud itu jang-barangkali oleh karena kurang mengerti akan tata tertib dalam pemerintahan - meneruskan surat itu ke pihak atasan dengan tjatatan demikian misalnja: " Diteruskan kepada alamatnja dengan permintaan serupa ".

/meneruskan

Hal ini sudah tentu kurang pada tempatnja terhadap Kepala2 Daerah di atasannya. Tulisan ini hanja tepat dipakai untuk ~~menteruskan~~ surat sematjam jang kami makaud kopada instansi bawahnya (misalnja dari Bupati kepada Wedana, Wedana kopada Kepala Negeri), tapi tidak dari Wedana kepada Bupati dan seterusnya.

Kami minta supaja hal ini diperhatikan benar2 djangan sampai terulang kembali. Sebagai pegawai negara kita harus banjak memenuhi sjarat2 misalnja: kedjudjuran, kesanggupan, keradjinan, keberanian dan kesopanan. Kesopanan ialah jang paling penting sebab mempengaruhi soal ketjaksanaan2 lainnja.-

KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH,

Kepada  
SEMUA BUPATI2 SELURUH ATJEH/  
Wali Kota Koetaradja.

\*.- R. MARJONO DANOEBROTO -.\*

-----  
TERBUSAN dikirim dengan hormat kepada  
1. Wedana2 Seluruh Atjeh,  
2. GUBERNUR SUMATERA UTARA di MEDAN,  
untuk dimaklumi.-

\*\*\*\*\*

KOETARADJA, 16 M E I 1950.-

No: 3514/5/Um.

Jampiran : -.-

Perihal : Surat-menjurat setjara  
rasmi.-----

Dengan hormat.

1. Beberapa kali kami mendjumpai suara2  
dines dari Kepala (daerah,djawatan) jang dialamatkan  
kepada Kepala (daerah,djawatan) atau pegawai2 Negara  
lainnja dengan penuh tjatjian dan perkataan jang ka-  
sar2.Sekalipun terkadang2 dapat dimengerti - terdo-  
rong oleh perasaan ketjewa atau kesal hati - namun  
tjara surat-menjurat ini tidak dapat dibenarkan.

2. Tjara surat-menjurat rasmi dikalangan Pe-  
merintahan mempunjai istilah-istilah dan rangkaian  
kata2 jang tertentu, diikat oleh tjara berfikir jang  
teratur dan dasar2 kesopanan, jang selalu diindahkan  
oleh tiap2 pegawai pemerintahan jang mempunjai rasa  
tanggung djawab.

Menjimpang dari garis2 ini menundjukkan  
bakat dan tabeat seorang pegawai jang melakukannya.

3. Hawa nafsu jang timbul dari perasaan ke-  
tjewa atau kesal hati dalam hubungan rasmi antara sa-  
tu ~~sama~~ lain djawatan maupun dengan pihak partikular  
harus ditekan.Dalam pada itu tidak sukar bagi pegawai  
jang mahir dalam kesusteraan untuk menjatakan perasa-  
annja dalam susunan kata2 jang halus jang tidak menjin-  
gung kehormatan orang lain.

Harap ditjatkan.-

A/N.G U B E R N U R A T J E H,  
S E C R E T A R I S,

-.R.MARJONO DANOEBROTO.-

Kepada

Jth.Saudara2 :

1.Bupati2 seluruh Atjeh/Langkat

(+ rekaman untuk Wedana2 jang bersangkutan)

2.Kepala2 Djawatan/Kantor Centraal + Propinsi  
-----

Rekaman : 1.Untuk Dewan Pemerintahan Daerah

Propinsi Atjeh buat dimaklumi.

2.Kepala2 Bahagian Kantor Gubernur + Propinsi.  
-----

Kutaradja, 14 Februari 1951.-

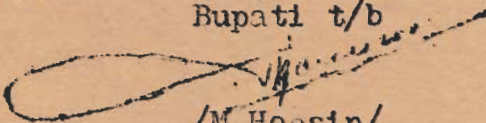
No.683/35/Um.-

Lampiran: 1  
Perihal : Surat - menjurat.-

Salinan surat Gubernur Sumatera Utara tgl.30-1-1951 No.  
746/1/PSU.-

Dengan hormat dikirimkan kepada saudara Bupati2 seluruh  
Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2) untuk dimaklumi dan dita'ati.-

A.n.Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh  
Bupati t/b

  
/M.Hoesin/

KANTOR GUBERNUR SUMATERA UTARA  
DJALAN DJOKJA No.30 MEDAN

Medan, 30 Januari 1951

No.746/1/PSU.  
Isi: Surat-menjurat

Dengan hormat,berhubung pada belakang ini ternjata bahwa  
diantara Kepala2 Daerah ada yang terus langsung mengirim su-  
rat kepada Kementerian di Djakarta dengan keinsjafen bahwa  
yang demikian sebenarnja ada bertentangan dengan peraturan  
djalannja administrash,karena tidak melalui instansi2 ata-  
sannja (berdjendjang naik).

Maka dengan ini kami memperingatkan agar hal ini tidak  
akan berulang lagi pada masa yang akan datang dan semua su-  
rat-menjurat dari Kabupaten harus via Koordinator disampai-  
kan kepada kami.


Dimintak dengan sangat agar hal ini mendjadi perhatian  
bagi yang bersangkutan.-

A.n.Gubernur Propinsi S.Utara  
Residen t.p,  
d.t.o.,Tk.Poedsjah  
Untuk salinan yang serupa  
Klerk Kepala

Kepada  
Jth.Sdr.Koordinator Pemerintahan  
Atjeh

di

Kutaradja

  
/T.Ali Rasia/

Kutaradja, 14 Februari 1951.-

No. 683/35/Um.-

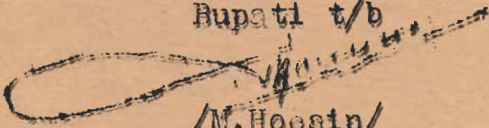
Lampiran: 1

Perihal: Surat-surat menjurat.-

Salinan surat Gubernur Sumatera Utara tgl. 30-1-1951 No. 746/1/PSU.-

Dengan hormat dikirimkan kepada saudara Bupati<sup>2</sup> seluruh Atjeh (+ rekaman untuk Wedana<sup>2</sup>) untuk dimaklumi dan dita'ati.-

A.n. Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh  
Bupati t/b

  
/M. Hoessin/

KANTOR GUBERNUR SUMATERA UTARA  
DJALAN DJOKJA No. 30 MEDAN

Medan, 30 Januari 1951

No. 746/1/PSU.  
Perihal: Surat-surat menjurat

Dengan hormat, berhubung pada belakang ini terajata bahwa diantara Kepala<sup>2</sup> Daerah ada yang terus langsung mengirim surat kepada Kementerian di Djakarta dengan kainsjafen bahwa yang demikian sebenarnya ada bertentangan dengan peraturan djalannya administrasi, karena tidak melalui instansi<sup>2</sup> atasannya (berdjendjang naik).

Maka dengan ini kami memperingatkan agar hal ini tidak akan berulang lagi pada masa yang akan datang dan semua surat-surat menjurat dari Kabupaten harus via Koordinator disampaikan kepada kami.


Dimintak dengan sangat agar hal ini menjadi perhatian bagi yang bersangkutan.-

A.n. Gubernur Propinsi S. Utara  
Residen t/b,  
d. t. e. M. Paredsjah  
Untuk salinan yang serupa  
Klerik Kepala

Kepada  
Jth. Sdr. Koordinator Pemerintahan  
Atjeh

di

Kutaradja

  
/T. Ali Rasion/